

Indonesia Minta Junta Hindari Kekerasan

Menteri Luar Negeri RI Hassan Wirajuda meminta junta Myanmar agar tidak menggunakan kekerasan dalam menghadapi para pengunjung rasa. Permintaan itu disampaikan Menlu di New York, Selasa (25/9) malam waktu setempat. Hassan menegaskan, cara kekerasan tidak hanya merugikan rakyat Myanmar sendiri, tetapi juga ASEAN. "Masalah Myanmar akan mendapat sorotan negatif lebih besar dari masyarakat internasional dan hal ini juga akan merugikan ASEAN," ujarnya. Dia menambahkan, para menlu negara-negara ASEAN akan mengadakan pertemuan di New York, Kamis (27/9), untuk meminta Pemerintah Myanmar menjelaskan perkembangan situasi di negara itu. Di Jakarta, puluhan mahasiswa Buddha berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Myanmar. Mereka menyatakan mendukung demonstrasi anti-junta di Yangon. Para pengunjung rasa memasang spanduk bertuliskan antara lain "Solidaritas untuk Burma". Mereka berteriak "Tolak junta militer", "Bebaskan Aung San Suu Kyi".

Di belahan dunia lain, kecaman terhadap junta militer dan dukungan kepada para pengunjung rasa di Yangon juga bermunculan. Pemerintah Perancis mendesak Uni Eropa (UE) agar memberi sanksi lebih keras terhadap junta. Menurut rencana, Presiden Perancis Nicolas Sarkozy akan bertemu dengan kelompok oposisi Myanmar. UE menyatakan siap untuk mengikuti langkah Amerika Serikat yang memerintahkan sanksi lebih keras terhadap junta Myanmar. Dari Tokyo dilaporkan, Pemerintah Jepang mengancam akan menghentikan proyek bantuan kepada Myanmar. Jepang juga meminta junta menghindari kekerasan. "Pemerintah Jepang sekarang ini mendorong Pemerintah Myanmar untuk bersikap tenang," ujar Menlu Jepang Masahiko Komura dalam sebuah konferensi pers. (Sumber : Kompas tgl. 27 September 2007)

Peringkat Kemudahan Berbisnis di Indonesia Naik

Kemudahan berusaha di Indonesia menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Laporan Bank Dunia dan International Finance Company (IFC) bertajuk "Doing Business 2008" menyebutkan, dari 178 negara, kemudahan berbisnis di Indonesia menempati peringkat 123. Peringkat ini membaik dibanding sebelumnya yakni 135 pada tahun lalu. Kedua lembaga internasional tersebut menilai, Indonesia bersama Cina, Mesir, Turki, India dan Vietnam merupakan negara yang berhasil mereformasi kemudahan berbisnis. Perlindungan investor di Indonesia dianggap terus membaik dan informasi mendapatkan kredit juga semakin mudah.

"Kenaikan peringkat ini juga karena stabilnya makro ekonomi, peluncuran tiga paket kebijakan pada 2006, paket kebijakan sektor riil Juni lalu, dan disahkannya Undang-Undang Penanaman Modal dan Administrasi Pajak," papar Kepala Ekonom Bank Dunia PS Srinivasan di Jakarta, kemarin. Namun, indikator memulai usaha di Tanah Air justru memburuk dibanding tahun lalu.

Indonesia bersama-sama dengan Bangladesh, Siria dan Rumania dianggap belum melakukan reformasi yang memadai (negatif reformasi). Bank Dunia menilai, jumlah 105 hari yang diperlukan untuk memulai suatu usaha di Indonesia, jauh lebih lama dibanding negara tetangga--apalagi angka ini ternyata bertambah dibanding tahun lalu yang hanya 97 hari. "Bandingkan dengan Laos 103 hari, Kamboja 86 hari, Vietnam 50 hari, Malaysia 24 hari, dan Singapura 5 hari," papar Srinivasan. Modal minimum yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia juga jauh lebih mahal dibanding negara Asia. Hal ini terlihat dari rasio modal terhadap pendapatan per kapita di Indonesia sebesar 38,44 persen, sedangkan Malaysia hanya 0,01 persen. "Vietnam, Thailand dan Singapura sepenuhnya telah menghapus ambang batas ini," ucapnya.

Secara keseluruhan, peringkat kemudahan berbisnis Indonesia juga masih kalah jauh dibanding negara tetangga, seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam, bahkan Sri Langka. Singapura dianggap yang paling mudah untuk menjalankan bisnis. Dalam dua tahun berturut-turut sejak 2006, Singapura menempati peringkat pertama.

Bank Dunia menyebutkan peringkat kemudahan berusaha itu memang tidak mencakup semua hal dalam aspek investasi, karena ruang lingkupnya hanya terbatas pada regulasi berusaha. Perhitungan peringkat tidak memperhitungkan kualitas infrastruktur, perlindungan hak milik dari pencurian, transparansi pengadaan barang pemerintah dan tidak mencerminkan kondisi makro ekonomi suatu negara. Tapi, peringkat yang tinggi menunjukkan pemerintah negara yang bersangkutan berhasil menciptakan regulasi yang mendorong iklim berusaha semakin kondusif.

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Joachim von Amsberg menilai, Indonesia harus sesegera mungkin melakukan reformasi untuk mengejar ketertinggalan dari negara tetangga yang mendapat peringkat lebih tinggi. "Indonesia harus lari lebih kencang lagi karena negara lain juga melakukan hal yang sama," ujarnya.

Secara terpisah, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Investasi Chris Kanter menuturkan, pemerintah jangan berpuas diri dulu dengan kenaikan peringkat itu. Sebaliknya, kata dia, pemerintah tidak bisa berdiam diri karena hasil survei ini merupakan pemicu agar lebih keras lagi melakukan reformasi. Menurut ekonom Centre for Strategic & International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi, kenaikan peringkat ini harus bisa dimanfaatkan pemerintah untuk berpromosi mengundang investor masuk. Sedangkan reformasi yang diutamakan adalah reformasi hukum. "Secara politis, pemerintah dan kaum oposisi mendukung program reformasi. Tinggal bagaimana mengamankannya hingga level operasional," katanya. (Sumber : Tempo Interaktif tgl. 27 September 2007)

Survei Bank Dunia RI Peringkat 123

Indonesia menduduki peringkat 123 di antara 178 negara di dunia dalam survei kemudahan berbisnis (Doing Business 2008) yang diumumkan Bank Dunia, Rabu (26/9). Sementara itu, negara tetangga Singapura menduduki peringkat pertama dari 178 negara yang disurvei.

Dalam situs Bank Dunia tersebut Indonesia berada di bawah Thailand yang menduduki peringkat 15, Malaysia (24), Brunei (78), dan Vietnam (91). Namun Indonesia berada di atas Filipina yang menduduki peringkat 133.

Dari 10 besar yang masuk dalam kemudahan berbisnis, yakni Singapura (1), New Zealand (2), Amerika Serikat (3), Hong Kong (4), Denmark (5), Inggris (6), Kanada (7), Irlandia (8), Australia (9), dan Islandia (10). Sementara negara tetangga Timor Leste menduduki peringkat 11 dari bawah mengenai kemudahan bisnis.

Dalam situs ini ditekankan jika pemerintah tidak melakukan reformasi peraturan maka negara lain akan mengambil alih. Indikator kemudahan bisnis ini hanya dibatasi pada regulasi bisnis tetapi tidak menghitung pengaruh negara ke pasar, kualitas pelayanan infrastruktur, keamanan properti yang dimiliki investor, transparansi dalam pengadaan barang oleh pemerintah, kondisi makroekonomi, dan konsistensi berbagai institusi pemerintah. Peringkat yang tinggi tetap diberikan kepada pemerintah yang telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk melakukan kegiatan bisnis.

Iklim Membaik

Sementara itu, pemerintah menilai iklim investasi di Indonesia sudah membaik. Di antaranya, biaya untuk berusaha (cost doing business) sudah lebih murah dibandingkan pada pertengahan 2006. Selain itu, proses restitusi pajak juga sudah lebih cepat. Kesimpulan itu berdasarkan survei yang dilakukan LPEM UI terhadap 589 perusahaan di Indonesia. "Iklim investasi bagus. Apa yang telah di sampaikan tadi, khususnya jika di sisi ekonomi makro jelas sudah berada pada treknya. Progress-nya bagus," ujar Wakil Ketua Kadin Indonesia Chris Kanter usai mengikuti sosialisasi perkembangan iklim investasi yang digelar pemerintah di Jakarta, Selasa (25/9). Di sisi lain, kejelasan mengenai penjaminan pemerintah

akan mendorong pelaksanaan proyek infrastruktur. Namun, pada bagian ini, Chris mengatakan pembebasan tanah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, pihaknya meminta pemerintah untuk terus memperbaikinya.

Sedangkan, mengenai birokrasi yang selama ini turut menjadi kendala bagi investasi, Chris mengatakan, reformasi yang dilakukan pemerintah, baik di Direktorat Jenderal Pajak maupun di Departemen Perdagangan sudah menunjukkan perbaikan. "Perubahan-perubahan cukup signifikan," katanya Sementara itu, hasil survei yang dipaparkan Chatib Basri, Ekonom LPEM UI menyebutkan biaya berusaha menjadi lebih baik. Pada restitusi pajak yang dulu menjadi keluhan penguaha, survei yang dilakukan pertengahan tahun ini menunjukkan aanya perbaikan. "Untuk restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pada 2006 perlu waktu 6,3 bulan. Sedangkan, 2007 hanya perlu waktu 5,1 bulan. Jumlah yang bisa diperoleh juga meningkat, yakni 84 persen," kata Chatib. Pada jalur impor, untuk jalur merah dipercepat dari 7,6 hari di 2005 menjadi 5,9 hari di 2007. Sedangkan, jalur hijau, dari 6,1 hari di 2005 menjadi 3,1 hari di 2007. (Sumber : Sinar Harapan edisi 27 September 2007)